PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR SATYA MITRA ANDALAN TAHUN 2018

Latar Belakang

Meninggalkan tahun 2018 dan berjalan di tahun 2019, Bank Perkreditan Rakyat Satya Mitra Andalan selanjutnya disebut Bank Satya, telah melewati fase recovery, dimana usaha bank mulai tumbuh berkembang walaupun tidak secara drastis. Hal ini telah dicermati dan mendapat perhatian penuh manajemen. Beberapa kebijakan bisnis telah diambil guna mengantisipasi kemungkinan tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan yang secara keseluruhan masih lesu, maupun tingkat inflasi yang mungkin saja mempengaruhi daya beli dan gerak pelaku ekonomi micro yang merupakan target pasar bagi usaha bisnis Bank Satya.

Untuk menempatkan rasio BOPO yang cukup, Bank Satya melakukan efisiensi disemua bagian, efektifitas dalam pekerjaan, serta mereposisi tugas dan wewenang karyawan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada Job desk pada unit/bagian tersebut. Disisi lain, unit bisnis di pacu untuk menghasilkan portofolio yang bagus dan rasio CAR tetap berada di atas 12 % sekaligus NPL dibawah 5%.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, fungsi Bank satya sebagai perantara bagi pihak yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kondisi demi keberlangsungan usaha. Sehingga dapat secara terus menerus melayani nasabah dengan baik dan terus menjadi semakin baik. Oleh sebab itu Bank Satya harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Bank Satya menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika (tercantum dalam kode etik) dan *Good Corporate Governance*.

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya dan melihat tantangan dan peluang ke depan, Bank Satya tetap menjadikan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam antara Lembaga Jasa Keuangan yang

ada di Provinsi Kepri umumnya dan Kota Batam khususnya. Dimana peningkatan wawasan dan pengetahuan karyawan di sektor Perbankan akan menjadikan Bank Satya unggul atau setidaknya lebih maju dalam hal pelayanan, karena kecenderungan saat ini untuk bunga dan biaya kredit hampir sama dan merata. Tinggal dibutuhkan kreatifitas dan pelayanan optimal untuk memenangi persaingan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Maka Bank Satya tetap mengedepankan lima asas atau pilar utama Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Kebijakan & Prosedur GCG Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Satya Mitra Andalan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

- a. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- c. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- d. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- e. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah :

1. Undang-Undang

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13./ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Buku Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 – Komite Nasional Kebijakan Governance.

3. Anggaran Dasar PT BPR Satya Mitra Andalan dan Perubahannya.

- **Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

a.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi. Anggota Direksi lengkap. Untuk Dewan Komisaris sudah lengkap sesuai ketentuan.

- Komisaris berjumlah 2 (dua) orang
- Penambahan Calon Komisaris sesuai ketentuan dalam tahap pengajuan nama calon.

- Komisaris dan Direksi yang ada saat ini telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Antara Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah mendapat laporan dan evaluasi dari Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank
- Dewan komisaris secara berkala telah melakukan kunjungan terhadap debitur bank (*on the spot*) untuk mengevaluasi fasilitas kredit yang telah diberikan apakah sesuai dengan peruntukannya.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur)

diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3 Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris

Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Kenaikan Gaji Karyawan 2018
- Revisi RBB PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun 2018
- Persetujuan pemberian Bonus
- Penghapusan kredit macet 2018
- Pemberian bonus karyawan 2018
- Pembelian inventaris kantor 2018
- Perubahan ketentuan hak dan fasilitas Direksi dan Komisaris

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Dikaitkan dengan asset bank yang masih di bawah Rp.80.000.000.000,- maka BPR Satya Mitra Andalan tidak membentuk komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. fungsi kepatuhan

- Direktur merangkap kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan

yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Direktur merangkap kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

c.2. Fungsi Audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik namun masih harus dioptimalkan sesuai SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank).

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP (Brierley Price Prior) RBIA (*Risk Based Internal Audit*), yang menjadi acuan dasar di berbagai negara termasuk Indonesia. Audit Intern berbasis Resiko ini di adaptasi seperti dalam SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), selanjutnya menuju kepada audit tiga bulanan, Audit semesteran, audit Tahunan dan Audit Khusus sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk **Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Harris dan Gindo** yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan manajemen
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

- Penerapan GCG untuk Manajemen Risiko ini belum berjalan sepenuhnya, karena masih dalam penyusunan dan perumusan SPO. Untuk saat ini pengendalian internal dilakukan berdasarkan Job Description masing masing bagian dan double cross check dari atasan langsung. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern diharapkan akan seutuhnya terlaksana di tahun berikutnya.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPKM

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPKM dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPKM kepada OJK.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (OS)
1	Kepada Pihak Terkait	1	Rp. 53.627.497,-

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018

- Meningkatkan volume penyaluran kredit dan penghimpunan dana, khususnya dana murah dengan pengembangan sistem pemasaran dan produk-produk/ program inovatif
- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta terus mengembangkan teknologi informasi agar pelayanan kepada nasabah dapat terus diperbaiki.
- Memperbaiki kinerja keuangan dengan meningkatkan pendapatan, control biaya yang lebih terukur serta penyelesaian AYDA dan NPL.

- Mengembangkan struktur organisasi agar alur kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan karyawan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan,
- Menerapkan Tata Kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian manajemen resiko.
- Menjalankan kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan Teknologi Informasi dan SOP yang memadai.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Satya Mitra Andalan untuk jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Mengupayakan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM berupa modal kerja dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Rasio LDR per 31 Desember 2018 sebesar 81,04%. Upaya peningkatan ekspansi harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Satya Mitra Andalan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kredit yang berkurang dari tahun sebelumnya yang dilihat dari jumlah Outstanding.

No	OS Kredit	2017	2018	%
1		Rp. 52.540.589.897,-	Rp. 55.304.846.551,-	5,3

- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif. Tahun 2018 terdapat kenaikan pencapaian dari tahun sebelumnya disebabkan peningkatan pertumbuhan kredit dan suku bunga cukup kompetitif. Hal ini terlihat dari table di bawah ini.

No	Dana Pihak Ketiga	2017	2018	%
1	Tabungan	Rp. 2.384.751.841,-	Rp. 2.709.105.884,95	13,6
2	Deposito	Rp.52.054.919.475,-	Rp. 54.022.072.561,-	3,8

- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah, dapat digambarkan secara umum.

- Meningkatkan penguatan permodalan
- Meningkatkan pangsa pasar dengan pengembangan Brand image.
- Meningkatkan volume usaha dengan memperluas jangkauan layanan dengan ekspansi Kantor Pelayanan kas atau Kantor Cabang BPR.
- Meningkatkan layanan berbasis teknologi dengan menciptakan produk inovatif dan kerjasama pihak ketiga.
- Memelihara loyalitas Nasabah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan bank.
- Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Resiko yang lebih maksimal sesuai dengan peraturan OJK dengan memperkuat lini pengawasan.
- Pengembangan kualitas SDM secara berkesinambungan.

1) Finansial

- Berupaya mencapai pertumbuhan kredit yang diimbangi pertumbuhan dana pihak ketiga untuk menjaga tingkat rasio yang sehat. Untuk tahun 2017, terdapat kenaikan 7,2 %, dimana hal ini

harus menjadi perhatian serius agar tetap berada pada ratio yang sehat dan terkendali.

LDR	2017	2018	Pertumbuhan
	92,21 %	81,04 %	-3,9 %

- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif yaitu dibawah 85% dengan pelaksanaan efisiensi biaya operasional.

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar kredit modal kerja 22.14 % dan konsumen di atas 5.08 %
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Satya Mitra Andalan.

3) Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan
- sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Satya Mitra Andalan melalui *Competency Based Human Resources Management*.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan telah diberlakukan serta SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank yang diharapkan akan segera diberlakukan.
2. Bank sedang melakukan kajian berupa instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya secara bertahap kedepannya

5. Pembuatan *Home Page* PT. BPR Satya Mitra Andalan, sesuai dengan ketentuan .
6. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
7. PT. BPR Satya Mitra Andalan menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Satya Mitra Andalan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan.

tidak memiliki saham pada PT. BPR lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Satya	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	P,Saham BPR/Prshn Lain	Bidang Usaha
Tri Siska Yuliana	Komisaris	Tidak ada	Accounting & Finance	Tidak ada	Kontraktor Umum
Harryanto	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Erwin	Dirut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hendri	Dir rangkap Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Komisaris dan Direksi PT. BPR Satya Mitra Andalan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Tri Siska Yuliana	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Harryanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Erwin	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k	Y a	Td k
Hendri	Direktur Rangkap Kepatuhan		√		√		√		√		√		√

3. kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

paket remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 1.268.778.297,-

sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp. 21.979.399.- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji,dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dll)		Rp. 376.050.909,-		Rp. 892.727.388,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura/ non natura (fasilitas tidak tetap lainnya, perumahan ,transportasi, asuransi kesehatan,dll)	2	Rp. 3.840.000,-	2	Rp. 18.139.399,-
Total	2	Rp 379.890.909,-	2	Rp. 910.866.787,-

Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam 1 tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan :

Tingkat penghasilan dalam 1(satu) tahun	Jumlah direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 500jt-1 miliar	-	-
Rp. 500 juta kebawah	2	2

4. Share Option

Sampai saat ini tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,50 x
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,05 x
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 2,66 x
- ratio gaji Direksi yang tertinggi dan komisaris tertinggi = 1,23 x
- ratio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,73 x

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

Rapat Komisaris

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Pembahasan : Kinerja BPR, anggaran dan Realisasi RBB BPR 2018, Kredit dalam penyelesaian, AYDA, Kredit pelunasan dipercepat, Struktur Organisasi	11 April 2018	Komisaris ,Direksi
2	Pembahasan : Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, isu-isu strategis, evaluasi kredit bermasalah dan AYDA, tindak lanjut temuan dari audit eksternal (OJK), Rencana Bisnis Bank	7 Agustus 2018	Komisaris ,Direksi
3	Pembahasan : Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR, isu-isu strategis, evaluasi kredit bermasalah dan AYDA, rencana Bisnis Bank	9 Oktober 2018	Komisaris dan Direksi
4	Pembahasan : Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR, isu-isu strategis	22 November 2018	Komisaris, Direksi

Data kehadiran rapat Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Jumlah rapat	Jumlah kehadiran	Persentase hadir
1	Tri Siska Yuliana	4	4	100 %

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan

kredit di BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2018 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

No.	Kasus		Keterangan
	Perdata	Pidana	
2	–	1	Laporan Kepolisian

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Satya Mitra Andalan selama tahun 2018 dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Satya Mitra Andalan.

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan. periode 31 Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,89 dengan predikat Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0,38
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	0,31
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi Komite	0.00%	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0,25

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0,05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0,15
10	Rencana Blsnis BPR	7,50%	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan	7,50%	0,20
	Nilai Komposit	100%	1,89
	Predikat Komposit		Baik

a. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya sebagian besar SOP GCG PT. BPR Satya Mitra Andalan, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Satya Mitra Andalan tahun buku 31 Desember 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Satya Mitra Andalan

Tri Siska Yuliana
Komisaris Utama

Erwin
Direktur Utama